

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kemiskinan menjadi salah satu tantangan utama yang dihadapi oleh banyak negara, terutama di negara-negara berkembang termasuk negara Indonesia. Berdasarkan data badan pusat statistika (BPS) persentase kemiskinan di Indonesia sampai Maret 2025 yaitu 8,47% dengan angka kemiskinan ekstrim sebanyak 0,85%. Bahkan berdasarkan data dari bank dunia tahun 2024 lebih dari 60,3% penduduk Indonesia atau sekitar 171,8 juta orang tercatat masih hidup di bawah ambang batas garis kemiskinan (Badan Pusat Statistik, 2025). Persentase tersebut belum mencapai target penurunan kemiskinan 7,5% serta penghilangan kemiskinan ekstrem nol persen sebagaimana Inpres Nomor 4 Tahun 2022 yang dirancang pemerintah (Teja, 2024). Oleh karena itu, kemiskinan pada masyarakat Indonesia masih menjadi isu sosial yang penting untuk diteliti secara berkelanjutan.

Hal tersebut dikarenakan masalah kemiskinan di Indonesia bukan hanya sekedar kurangnya pendapatan perekonomian. Akan tetapi, menyangkut lebih jauh dari hal tersebut yaitu mengenai kerentanan, aksesibilitas, ketidakberdayaan, dan kriminalitas. Hal tersebut membutuhkan perhatian dari berbagai pihak, sehingga proses penanggulangan kemiskinan yang efektif perlu diterapkan pemerintah karena permasalahan ini merupakan permasalahan yang multidimensional menyangkut berbagai aspek dalam masyarakat.

Banyak program penanggulangan kemiskinan yang dibuat pemerintah, akan tetapi kebanyakan dari program tersebut hanya bersifat pemenuhan akan kebutuhan dengan orientasinya terhadap pembangunan *top-down* yaitu pengentasan kemiskinan yang berorientasi dari atas (pemerintah) ke bawah (masyarakat). Dalam pembangunan *top down* masyarakat tidak berkesempatan terlibat dalam suatu pembangunan (Hariyanto, 2021). Dengan kata lain masyarakat hanya penerima manfaat dari bantuan yang diberikan pemerintah. Program-program tersebut yaitu PKH, BPNT, BLT, dan raskin. Para penerima bantuan sosial tersebut dalam kementerian sosial di sebut sebagai keluarga penerima manfaat (KPM) mereka

merupakan keluarga yang telah memenuhi kriteria dan telah ditetapkan melalui keputusan sebagai penerima bantuan sosial.

Bantuan sosial dengan pemenuhan kebutuhan pokok merupakan solusi penanggulangan kemiskinan jangka pendek. Di mana bantuan yang diberikan bersifat konsumtif hanya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari (Salsabila, 2024). Tidak hanya itu Program-program seperti BLT, BPNT, dan PKH memang membantu mengurangi beban sementara, namun berpotensi menimbulkan ketergantungan terhadap bantuan sosial. Program dengan mekanisme pemberian bantuan sosial berupa uang yang diberikan pada waktu yang telah ditentukan terus menerus. Dikhawatirkan akan menimbulkan persepsi bahwa bantuan sosial merupakan gaji bagi mereka, sehingga mereka akan terus menerima uang tersebut. Dari persepsi tersebut dikhawatirkan akan menimbulkan ketergantungan bantuan sosial di masyarakat. Alasannya yaitu karena selama mereka terdata sebagai masyarakat miskin yang terdaftar dalam data terpadu kesejahteraan sosial sebagai penerima bantuan kemungkinan besar mereka akan terus tergolong kepada masyarakat miskin jika tidak ada perubahan sistem.

Bila keadaan tersebut tidak berubah tujuan dari program-program pengentasan kemiskinan tidak akan terwujud. Berdasarkan Permensos No 1 Tahun 2018 yaitu meningkatkan taraf hidup keluarga penerima manfaat, mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan, menciptakan perubahan perilaku dan kemandirian, dan mengurangi kemiskinan (Kementerian Sosial RI, 2018). Hal tersebut juga diperkuat dengan pernyataan dari menteri sosial Saifullah Yusuf dalam Rapat Kerja bersama Komisi VIII DPR menyampaikan bahwa adanya fenomena demotivasi di kalangan penerima bantuan sosial. Fenomena tersebut karena sebagian masyarakat menjadi terlalu nyaman dengan keberadaan bansos, sehingga mengurangi semangat mereka untuk berusaha mandiri. Fenomena ini tercermin dari rendahnya angka graduasi atau keberhasilan KPM untuk keluar dari status sebagai penerima manfaat yang mengindikasikan adanya masalah struktural dalam mekanisme pelaksanaan program bantuan sosial itu sendiri (Anggrainy, 2024).

Hal ini menjadi sorotan peneliti, karena ketidakjelasan dalam penentuan sasaran penerima manfaat justru menjadikan PKH tampak sebagai program yang hanya berfokus pada pemberian bantuan sosial semata. Akibatnya, tujuan jangka panjang untuk mendorong kemandirian dan mengentaskan masyarakat dari garis kemiskinan menjadi terabaikan. Agar terlepas dari ketergantungan bantuan sosial dari hasil pembangunan *top down*. Pemerintah perlu menerapkan program yang berorientasi pada pembangunan *bottom up* di mana pembangunan yang dilakukan yaitu dari bawah ke atas dari masyarakat kepada pemerintah. Di mana masyarakat terlibat dalam proses program yang akan dirancang pemerintah, sehingga partisipasi masyarakat sangat ditekankan dalam pembangunan *bottom up*. Pembangunan berbasis *bottom up* identik dengan program pemberdayaan sosial.

Kedua strategi penanggulangan kemiskinan ini perlu diterapkan dengan pendekatan yang berbeda. Di mana bagi masyarakat yang dinilai masih dapat berdaya maka pendekatan *bottom up* lah yang perlu diterapkan, sedangkan bagi masyarakat yang sudah tidak dapat berdaya seperti lansia dan penyandang disabilitas maka pendekatan *top down* yang diterapkan. Keduanya perlu berkesinambungan agar masyarakat tidak selalu ketergantungan terhadap bantuan sosial.

Dalam menanggapi hal tersebut pemerintah mengeluarkan program PENA (Pahlawan Ekonomi Nusantara) yaitu program pemberdayaan yang dikeluarkan oleh kementerian sosial pada Desember 2022. Berdasarkan Permensos Nomor 7 Tahun 2023 program PENA merupakan program untuk mengembangkan semangat kewirausahaan, meningkatkan keterampilan berwirausaha bagi masyarakat miskin, kelompok rentan, kelompok terpicil, dan korban bencana. Bantuan ini berbeda dengan bantuan sosial lainnya yang dipergunakan untuk kebutuhan konsumtif bantuan PENA ini digunakan untuk berwirausaha (Kementerian Sosial RI, 2023).

Program ini lahir sebagai evaluasi dari bantuan sosial yang selama ini diberikan pemerintah. Penerima bantuan sosial yang bertahun-tahun perlu dilihat kembali kondisinya apakah mereka masih dapat berdaya atau tidak. Terutama ketika pandemi *covid-19* hadir di mana masyarakat Indonesia banyak yang kehilangan pekerjaan. Sebagaimana data Kementerian Tenaga Kerja sekitar 15,6% karyawan

terkena dampak PHK termasuk pekerja harian lepas dan pekerja informal meningkat (TNP2K, 2020). Akibatnya, banyak keluarga yang mengalami kehilangan pendapatan yang meningkatkan risiko kemiskinan di masyarakat.



Gambar 1.1 Grafik Persentase Penduduk Miskin (2018-2025)

Sumber: Diolah oleh peneliti dari data Badan Pusat Statistika (2018-2025)

Berdasarkan badan pusat statistika grafik persentase penduduk miskin meningkat pada masa pandemi yaitu pada awal tahun 2020. Dari yang berada di 9,2%, meningkat menjadi 10,2% (Badan Pusat Statistik, 2025). Peningkatan ini terjadi karena banyaknya pengangguran ketika pandemi, banyak usaha yang tutup, serta roda perekonomian tidak berjalan. Sehingga banyak masyarakat yang mengandalkan bantuan dari pemerintah.

Akibat dari naiknya grafik kemiskinan di atas berpengaruh terhadap seberapa besar bantuan sosial yang perlu pemerintah keluarkan. Besaran jumlah bantuan sosial yang dikeluarkan pemerintah, dipengaruhi oleh seberapa banyak keluarga yang masuk dalam kelompok miskin. Berdasarkan data dari tim nasional percepatan penanggulangan kemiskinan (TNP2K) terjadi peningkatan penerima bantuan sosial pada bantuan sembako/BPNT meningkat sebanyak 20 juta penerima yang awalnya sebanyak 15, 2 juta penerima, sedangkan penerima PKH menjadi 10 juta penerima dari 9,2 juta (TNP2K, 2020).

Jika dilihat dari penerima bantuan dampak dari pandemi dan dari observasi di lapangan, kemiskinan yang terjadi bukan karena mereka sudah tidak bisa berusaha akan tetapi karena mereka tidak memiliki modal untuk berusaha kembali. Maka program PENA ini lahir untuk mengurangi masyarakat miskin yang dirasa dapat

mandiri atau graduasi dari bantuan serta mengevaluasi bantuan kepada masyarakat penerima manfaat yang telah bertahun-tahun menerima bantuan sosial.

Dengan tujuan untuk mengurangi ketergantungan terhadap bantuan sosial. Syarat dalam Program ini berdasarkan petunjuk teknis program PENA diberikan hanya kepada masyarakat miskin yang menerima bantuan sosial atau dalam istilah kementerian sosial disebut sebagai keluarga penerima manfaat dengan syarat siap untuk berdikari, memiliki potensi berkembang, semangat untuk meningkatkan kesejahteraan, dan kriteria lain yang ditetapkan kementerian sosial. Kemudian mekanisme dari pemberdayaan masyarakat pada program PENA ini yaitu melalui bantuan modal, pelatihan dan pendampingan (Kementerian Sosial RI, 2022).

Pada program ini setiap desa memiliki pembimbing lapangan masing-masing mereka bertugas untuk membimbing para penerima bantuan mulai dari persiapan pendaftaran program, pelaksanaan program, sampai pasca program masih terus dipantau dan dibimbing. Lalu dalam pelaksanaannya para penerima bantuan diberikan wawasan dan pelatihan guna meningkatkan pemahaman mereka dan agar mereka dapat terus berkembang. Selain pendampingan dan pelatihan, para penerima bantuan PENA diberikan penguatan modal usaha sebesar Rp. 2.400.000/ Rp. 5000.000 sesuai kategori dari jenis penerimaannya. Pemberian modal usaha ini, diharapkan dapat memperkuat usaha penerima dan menciptakan wirausaha baru serta agar masyarakat bisa mandiri dengan kemampuan yang mereka miliki.

Setiap program pasti perlu adanya ukuran keberhasilan, sehingga pada program PENA ini dianggap berhasil apabila penerima bantuan terbangun jiwa kewirausahaan, mampu melakukan rencana usaha, mendapat akses pemasaran, memiliki akses untuk mengembangkan usaha, dan melakukan kerjasama dengan kemitraan. Intinya program ini dikatakan berhasil apabila usaha yang dijalankan maju di mana penghasilan yang didapat setara dengan UMR kemudian penerima bantuan dapat graduasi dan lepas dari bantuan sosial (Kementerian Sosial RI, 2022).

Berdasarkan data dari kementerian sosial dari awal program sampai April 2024 sebanyak 28.775 penerima bantuan PENA sudah berhasil graduasi atau terlepas dari bantuan sosial (Kementerian Sosial RI, 2024). Graduasi dari bantuan sosial (bansos) tersebut dilihat dari peningkatan penghasilan penerima, jika penerima

telah meningkat penghasilannya minimal setara dengan UMR daerahnya maka penerima tersebut dianggap mampu. Tujuan dari program ini, membentuk kemandirian penerima bantuan sosial dengan peningkatan jiwa usaha dengan dampak yang diharapkan terjadi peningkatan pendapatan dan mengurangi ketergantungan.

Maka dari itu, pengkajian program PENA pada setiap daerah perlu untuk mengukur sejauh mau daerah tersebut sudah dapat terlepas dari bantuan sosial dan memulai suatu usaha sebagaimana yang diharapkan dari program PENA ini. Selain itu, pengkajian pada setiap daerah juga perlu untuk melihat pemberdayaan melalui pendampingan dan pelatihan apakah sesuai dengan rancangan dari pemerintah atau tidak serta bagaimana cakupan hasil dari pemberdayaan dari setiap daerah tersebut. Setiap daerah pasti memiliki keunikan yang dimiliki penerima manfaatnya masing-masing, modal sosial dari setiap daerah tentunya berbeda-beda.

Sebagaimana program PENA pada Kota Tangerang berdasarkan penelitian dari Lastari dan Retnayu Prasetyanti dengan membahas penelitian yang sama terkait pemberdayaan masyarakat dengan PENA dengan objek penelitian yang berbeda yaitu di Kecamatan Karawaci Kota Tangerang. Dengan kata lain pada penelitian tersebut yang menjadi objek kajian adalah perkotaan, sedangkan penelitian ini mengkaji pada daerah pedesaan. Dalam jurnalnya program pemberdayaan yang dilakukan pada daerah tersebut yaitu kebanyakan pada usaha-usaha rumahan (Prasetyanti, 2024).

Hal ini tentu berbeda dengan penelitian yang peneliti ambil yang objeknya yaitu di daerah pedesaan. Pada Kecamatan Rancabali sendiri modal sosial yang dimiliki masing-masing penerima bantuan berbeda-beda. Pada kecamatan ini, rata-rata usaha yang mereka lakukan yaitu bertani, membuka warung, beternak, menjadi agen galon dan gas, dan membuka konter dan bengkel. Pada kecamatan ini terdapat 23 penerima bantuan di empat desa. Sebagai rinciannya sebagaimana tabel berikut:

Tabel 1.1 Jumlah Penerima Bantuan PENA Kecamatan Rancabali

Desa	Laki-laki	Perempuan	Jumlah Penerima Bantuan Pena
Alamendah	0	11	11
Cipelah	2	8	10
Patengang	-	1	1
Sukaesmi	-	1	1
Indragiri	-	-	-
Jumlah	2	21	23

Sumber: Pendamping PENA (Bapak Aji)

Pengambilan lokasi pada Kecamatan Rancabali menjadi pilihan dalam penelitian ini dikarenakan pada daerah Rancabali sebagai daerah pedesaan dengan kekayaan alam yang besar terutama berada pada daerah wisata dan daerah perkebunan serta pertanian apakah modal tersebut dapat dikembangkan melalui pemberdayaan yang dilakukan. Sehingga, pemberdayaan yang dilakukan akan berbeda dengan di perkotaan dikarenakan permasalahan yang dihadapi berbeda.

Terutama di daerah rancabali tempat pemukiman yang berada memiliki tempat yang jauh dikarenakan luas lahannya kebanyakan merupakan perkebunan dan pertanian, sehingga akses-akses publik seperti pasar dan akses transportasi masih terbatas. Kemudian berdasarkan hasil wawancara awal kebanyakan penerima bantuan sosial pada Kecamatan Rancabali yaitu memiliki pekerjaan sebagai buruh dan temuan yang menarik lainnya yaitu kebanyakan di Kecamatan Rancabali yang menerima program ini yaitu perempuan terdapat 21 orang dari 23 penerima yaitu perempuan hal ini menjadi salah satu alasan penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pemberdayaan seperti apa agar perempuan juga mampu membantu perekonomian keluarganya. Sehingga peneliti sangat tertarik untuk mengkaji hal tersebut dengan judul **“Pemberdayaan Ekonomi Keluarga Penerima Manfaat Melalui Program PENA (Pahlawan Ekonomi Nusantara) di Kecamatan Rancabali Kabupaten Bandung.”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan, maka rumusan masalah dalam fokus kajian penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana proses pemberdayaan ekonomi keluarga penerima manfaat melalui program PENA (Pahlawan Ekonomi Nusantara) di Kecamatan Rancabali Kabupaten Bandung?
2. Apa saja faktor pendorong dan penghambat dalam pemberdayaan ekonomi keluarga penerima manfaat melalui program PENA (Pahlawan Ekonomi Nusantara) di Kecamatan Rancabali Kabupaten Bandung?
3. Bagaimana dampak pemberdayaan ekonomi keluarga penerima manfaat melalui program pahlawan ekonomi nusantara (PENA) di Kecamatan Rancabali Kabupaten Bandung?

C. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah dan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, penelitian ini dilakukan dengan beberapa tujuan. Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui proses pemberdayaan ekonomi keluarga penerima manfaat melalui program PENA (Pahlawan Ekonomi Nusantara) di Kecamatan Rancabali Kabupaten Bandung.
2. Untuk mengetahui faktor pendorong dan penghambat dalam pemberdayaan ekonomi keluarga penerima manfaat melalui program PENA (Pahlawan Ekonomi Nusantara).
3. Untuk mengetahui dampak dari pemberdayaan ekonomi keluarga penerima manfaat melalui program PENA (Pahlawan Ekonomi Nusantara) di Kecamatan Rancabali Kabupaten Bandung.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini memiliki kegunaan, secara khusus kegunaan dari penelitian ini dapat dilihat secara ilmiah maupun secara praktis sebagai berikut:

1. Secara Ilmiah

Secara ilmiah penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian sosiologi, khususnya dalam bidang sosiologi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Penelitian ini turut memperluas wawasan terkait pemberdayaan dalam bahasan kemiskinan struktural di

pedesaan. Penelitian ini juga dapat menjadi referensi bagi penelitian-penelitian yang akan datang terutama terhadap program pahlawan ekonomi nusantara.

2. Secara Praktis

Kegunaan praktis dari penelitian ini ditujukan kepada pemerintah, pendamping program PENA, dan masyarakat baik yang menerima bantuan maupun tidak menerima bantuan. Untuk pemerintah dan pendamping serta pihak yang terlibat, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan laporan terkait program PENA pada daerah rancabali yang selama ini berjalan selama dua tahun. Serta penelitian ini diharapkan dapat memberikan usulan dan rekomendasi untuk meningkatkan pelaksanaan program tersebut. Serta harapan yang lebih besar bagi masyarakat yaitu penelitian ini dapat memotivasi masyarakat agar tidak ketergantungan terhadap bantuan sosial, terutama pada masyarakat penerima bantuan sosial yang merasa masih kuat untuk berusaha terlepas dari bantuan sosial dengan meningkatkan jiwa usaha melalui program ini. Semoga penelitian ini, akan meningkatkan jumlah penerima bantuan sosial yang ingin lebih mandiri.

E. Kerangka Berpikir

Pemerintah sebenarnya sudah merancang berbagai program untuk mengurangi kemiskinan. Program pengentasan kemiskinan disesuaikan dengan konsep pembangunan sektoral, pembangunan regional, dan pembangunan khusus. Konsepnya biasanya bersifat *top-down*, sangat sentralistik, dan kurang melibatkan partisipasi aktif masyarakat. Solusi dari pola pembangunan ini perlu ada perubahan persepsi dan konsep pembangunan di masyarakat di mana dari pembangunan yang berpola sentralisasi ke desentralisasi, dari pendekatan pembangunan yang bersifat *top-down planning* menjadi *bottom-up planning*, dari sistem komando menjadi proses pemberdayaan, dan dari ketergantungan menuju keberlanjutan (Wirutomo, 2022).

Dalam merespon solusi di atas kemudian pemerintah membuat program yang berorientasi terhadap pemberdayaan masyarakat. Program tersebut dirancang untuk menanggulangi ketergantungan masyarakat terhadap bantuan sosial, sehingga penerima program ini merupakan masyarakat yang telah menerima bantuan serta

dirasa dapat berdaya dengan potensi yang dimiliki serta fisik yang mumpuni. Maka dari itu syarat dari program ini yaitu sehat jasmani, berada pada usia produktif 20-40 tahun, memiliki usaha diutamakan, dan siap untuk graduasi. Dibuatlah program ini yaitu program pahlawan ekonomi nusantara (PENA) yang dikeluarkan kementerian sosial pada Desember 2022 (Kementerian Sosial RI, 2022).

Program ini lahir dari banyaknya fakta dilapangan bahwa tidak semua masyarakat miskin memiliki pemahaman tentang bagaimana mengelola bantuan dana dari pemerintah secara tepat. Jika bantuan hanya diberikan dalam bentuk dana tanpa adanya pendampingan atau edukasi, seringkali dana tersebut habis dipakai untuk hal-hal diluar pemenuhan pokok atau malah untuk gaya hidup semata. Akibatnya sering kali bantuan finansial yang diberikan tanpa pengawasan dan arahan justru tidak berdampak jangka panjang, karena itu pendekatan pemberdayaan dipilih sebagai jalan untuk membangkitkan potensi dan cara berpikir yang lebih maju agar masyarakat tidak hanya menerima bantuan tapi juga mampu berdiri kuat di atas usaha mereka sendiri.

Dengan pemberdayaan masyarakat berupa pendampingan usaha, pelatihan usaha, dan bantuan modal. Inti dari pemberdayaanya yaitu untuk penguatan ekonomi masyarakat dan menciptakan kemandirian. Proses dari program ini dengan tiga fase yaitu fase pemulihan sosial, fase transisi, dan fase pengembangan. Pemberdayaan ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas keluarga penerima manfaat agar mampu mandiri secara ekonomi dan sosial. Serta agar mereka dapat berdaya dengan sumber daya dan kemampuan yang mereka miliki yang tujuannya agar terlepas dari belenggu kemiskinan dan memperbaiki taraf hidup masyarakat.

Pemberdayaan Program PENA di Kecamatan Rancabali hampir semua penerima merupakan perempuan dari 23 penerima sebanyak 21 penerima merupakan perempuan. Fakta bahwa sebagian besar penerima manfaat Program PENA di Kecamatan Rancabali adalah perempuan memberikan gambaran gender yang penting untuk dianalisis dalam bahasan pemberdayaan ekonomi. Ini menunjukkan bahwa perempuan diposisikan sebagai subjek yang dilibatkan dalam program.

Dalam teori pemberdayaan Jo Rowlands (1997) dalam bukunya *Questioning Empowerment: Working With Women in Honduras*. Pada teori tersebut perempuan yang menjadi subjek dalam pemberdayaan yang sejalan dengan temuan nyata di lapangan terkait PENA di Kecamatan Rancabali kebanyakan yang menjadi penerima merupakan perempuan. Pemberdayaan perempuan bukan hanya soal peningkatan pendapatan, tetapi juga tentang pergeseran relasi kuasa dalam rumah tangga dalam masyarakat (Rowlands, 1997).

Pemberdayaan dalam pandangan Jo Rowlands (1997) adalah suatu proses yang meningkatkan kemampuan individu untuk membuat pilihan dan mengubah pilihan tersebut menjadi tindakan dan hasil yang diinginkan. Jo Rowlands membagi pemberdayaan ke dalam empat tindakan utama: *power within* (kekuatan dari dalam), *power to* (kemampuan untuk bertindak), *power over* (kemampuan untuk memengaruhi dan mengendalikan), dan *power with* (kekuatan melalui kerja sama). Keempat dimensi ini menjadi dasar dalam menganalisis bagaimana program PENA dalam memberdayakan KPM di Kecamatan Rancabali.

1. *Power within* (Kekuatan dari dalam)

Merujuk pada kekuatan diri sendiri terlihat ketika individu mulai mengenali nilai dan potensi dirinya. Ini mencakup pembangunan rasa percaya diri, harga diri, serta kemampuan untuk menyadari bahwa mereka memiliki hak untuk mengambil keputusan dalam hidupnya. Dalam pemberdayaan program PENA dimensi ini membantu melihat keputusan mereka dalam mengikuti program PENA ini, serta melihat potensi mereka untuk berkembang dan lebih maju.

2. *Power to* (Kemampuan untuk bertindak)

Kemampuan untuk mengambil tindakan dan membuat keputusan yang dapat mengubah kondisi kehidupan. Program PENA memberikan akses pada KPM untuk mengembangkan keterampilan, mendapatkan modal usaha, serta memahami bagaimana memanfaatkan peluang ekonomi di sekitar. Dari sana KPM memiliki kekuatan untuk mengambil tindakan nyata guna meningkatkan kesejahteraan ekonomi mereka.

3. *Power over* (kemampuan untuk memengaruhi dan mengendalikan)

Dimensi ini sering kali dimaknai secara kritis karena berkaitan dengan relasi kuasa. Merujuk pada kemampuan untuk memengaruhi dan mengarahkan pihak lain. Pada pelaksanaan program PENA, dimensi ini tercermin melalui peran pemerintah dan pendamping program dalam mengarahkan proses pemberdayaan KPM. Pendekatan ini tidak dimaknai sebagai bentuk kontrol sepihak melainkan diarahkan untuk mendorong KPM agar beralih dari ketergantungan pada bantuan menuju kemandirian ekonomi, sehingga peran pendamping lebih difokuskan sebagai perantara yang membuka ruang partisipasi aktif KPM. Tujuannya agar KPM memiliki kesempatan untuk terlibat dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan peningkatan pendapatan dan keberlanjutan usaha mereka.

4. *Power with* (kekuatan melalui kerja sama)

Pemberdayaan bukan hanya soal kemampuan individu, tetapi juga tumbuh melalui kebersamaan dan kerja sama antar berbagai pihak. Pada pemberdayaan program PENA kerja sama ini penting terutama terhadap pendamping PENA dan sesama penerima manfaat. Program PENA mendorong terbentuknya solidaritas, baik antara KPM itu sendiri maupun dengan pihak lain seperti pendamping sosial hingga pelaku usaha di lingkungan sekitar. Melalui kerja sama dalam kelompok usaha atau pertemuan rutin untuk berbagi pengalaman dan pengetahuan tercipta kekuatan bersama yang membantu mereka menghadapi berbagai tantangan ekonomi secara gotong royong.

Proses pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui program pahlawan ekonomi dengan teori Pemberdayaan Jo Rowlands, menjadi dasar dalam mengembangkan teori ini. Untuk memahami bagaimana konsep penelitian yang akan dilakukan akan dijabarkan kedalam skema konseptual, sebagai berikut:

Gambar 1.2 Skema Konseptual

